



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, Telp. 21985

Website : setda.bulelengkab.go.id, Email : setda@bulelengkab.go.id

S I N G A R A J A

Singaraja, 30 Januari 2023

Nomor : 500.10.29/482/I/Pem/2023
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Permintaan data.**

Kepada,
Yth. *Undangan terlampir*
di-

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 121/5711/OTDA tanggal 15 Agustus 2022 perihal Laporan Penjabat Bupati dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 057/2409/IJ tanggal 6 September 2022 perihal penyampaian data dukung dalam rangka penilaian Penjabat Kepala Daerah sehubungan dengan hal tersebut diminta untuk menyampaikan data dukung terlampir untuk kami laporkan sebagai Laporan Triwulan II . Dan data tersebut sudah kami terima paling lambat tanggal 6 Pebruari 2023 melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng untuk kami input menjadi satu laporan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

Lampiran Surat Sekretariat Daerah Kab. Buleleng
Nomor : 500.10.29/482/I/Pem/2023
Tanggal : 30 Januari 2023.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buleleng.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Buleleng.
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng.
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
13. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
16. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng.
17. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng.
18. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
20. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.
21. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng.



**DRAF INDIKATOR PENILAIAN PENJABAT
KEPALA DAERAH**

NO	ASPEK	INDIKATOR	OPD
1.	PEMERINTAHAN		
	a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		
	1) Kesehatan	Ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain stunting, mengaktifkan Posyandu dan PKK	DINKES,KBPP, BAPPEDA,DPMD
	2) Pendidikan	Ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	DISDIK
	3) Infrastruktur	Ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur	PUTR
	4) Pelaksanaan Pelayanan Publik	Kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi pelayanan publik. Misalnya adanya Mall Pelayanan Publik	DPTMPTSP
	b. Kewajiban Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/Kota	Responsifitas kepala daerah terhadap isu aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi (Rapat Rutin Bulanan dan Rapat Khusus)	BAG. PEMERINTAHAN
	c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia	1. Upaya yang dilakukan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan, serta kebhinekaan (suku, bahasa, agama, budaya)	KESBANGPOL, BAG.PROKOM (foto)
		2. Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL
	d. Menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Menjaga etika pribadi dan menjadi suritauladan sebagai Kepala Daerah	BAG.PEMERINTAHAN
		2. Pelanggaran administratif dan etika serta norma lain	BAG.PEMERINTAHAN
	e. Menjalin hubungan kerja bersama Forkopimda dan seluruh Instansi Vertikal di Daerah	Frekuensi koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh Instansi Vertikal di Daerah	KESBANGPOL DAN BAGIAN PEMERINTAHAN
	f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan		
	1) Kepatuhan kepada pemerintah pusat	Kepatuhan melaksanakan pemerintah	SEMUA OPD
	2) Pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi	Asesment terhadap struktur organisasi perangkat daerah	ORGANISASI

3)	Alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu	Penyiapan alokasi anggaran dan realisasidana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu	BPKPD, KESBANGPOL
4)	Pembentukan dan efektivitas pelaksanaan tugas satgaspangan dan TPID	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas satgaspangan dan TPID	BAGIAN EKBANG
5)	Penataan tenaga honorerterhadap kebijakan Pemerintah Pusat untuk moratorium honorer	1. Kepatuhan pelarangan pengangkatan tenaga honorer	BKPSDM
		2. Penataan dan penyelesaian tenaga honorer	BKPSDM

NO	ASPEK	INDIKATOR	
	6) Menjaga kondusifitas dan netralitas ASN	Kepatuhan pelarangan mutasi pejabat daerah tanpa izin Mendagri	BKPSDM
		Pembinaan dan pengawasan netralitas ASN	BKPSDM
2.	PEMBANGUNAN		
	a Ketepatan waktu penyusunan dan pengajuan rancangan Perdatentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda	Ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA PPAS	BPKPD, BAPPEDA
		Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan KUA PPAS dengan DPRD	BPKPD
		Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD	BPKPD
		Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan Perdatentang APBD menjadi Perda	BPKPD
	b Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAGIAN ORGANISASI
		Capaian MCP	INSPEKTORAT
		Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	INSPEKTORAT
		Kebijakan pencegahan korupsi	INSPEKTORAT
	c Pengelolaan APBD	Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	BPKPD
		Penyerapan Belanja Daerah yang cepat, baik, dan tepat sasaran	BPKPD
		Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa (minimal 40%)	BAGIAN PBJ
	d Realisasi Investasi	Kebijakan kemudahan investasi di daerah. Contoh: Promosi dan kemudahan perijinan berusaha	DPMPTSP
	e Inovasi	Adanya inovasi secara kualitas dan kuantitas	BALITBANG
3.	KEMASYARAKATAN		
		Pembinaan pejabat Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat	KESBANGPOL, POL PP
		Pengembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat	KESBANGPOL
		Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	INSPEKTORAT
		Kebijakan Mitigasi dan Penanggulangan bencana (antara lain penanganan PMK, longsor, banjir, dan kebakaran)	BPBD



DRAF SISTEMATIKA PELAPORAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Bab I	Pendahuluan	OPD
	Uraian terkait Kondisi Umum Daerah, Dasar Hukum, Maksud dan tujuan	Bappeda
Bab II	Pelaksanaan Tugas Pejabat Kepala Daerah	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	
	Kondisi Sosial, Politik, serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	KesbangPol dan PolPP
	Pembahasan Rancangan Perda dan Perkada serta penandatanganan perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum
	Pengisian pejabat dan mutasi pegawai, pembatalan perijinan dan/atau mengeluarkan perijinan baru, dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai ketentuan	BKPSDM dan DPMPTSP
	Fasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dan Pilkada tahun 2024	KesbangPol
	Pelaksanaan tugas sebagai Ketua Satgas Covid-19	BPBD
Bab III	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
	Aspek Pelayanan Publik	Semua OPD
	Aspek Pembangunan Daerah	Bappeda
	Aspek Keuangan Daerah	BPKPD
	Aspek Kepemimpinan Daerah	
	Aspek Kebijakan Daerah	
	Aspek Pemerintahan Desa	DPMD
	Aspek Kelembagaan Daerah	Bagian Organisasi
	Aspek Kepegawaian Daerah	BKPSDM
	Aspek Trantibum Linmas	PolPP
	Aspek Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capil
	Aspek Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan dan KesbangPol
Bab IV	Inovasi Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Kepala Daerah	
	penjelasan terkait inisiatif dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Kepala Daerah dalam mengatasi hambatan atau lebih mengefektifkan	Balitbang
Bab V	Penutup	
	memuat kesimpulan dan hal yang menjadi perhatian bersama dalam uraian bab sebelumnya	

